



MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DPRD KOTA YOGYAKARTA

KOMISI D DPRD KOTA YOGYAKARTA

Gerak Cepat Tindaklanjuti Permasalahan Warga Miskin

YOGYA (KR) - Kartu Menuju Sehat (KMS) kerap menjadi keluhan masyarakat. Terutama bagi warga yang pada tahun sebelumnya memperoleh KMS namun di tahun berikutnya tercoret. Tidak sedikit warga tersebut lantas mengadukan ke lembaga dewan. Komisi D DPRD Kota Yogyakarta pun berupaya gerak cepat dalam menindaklanjuti permasalahan warga miskin itu. Sesuai ketugasannya sebagai salah satu alat kelengkapan dewan, Komisi D membidangi urusan kesejahteraan rakyat. Termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Di DPRD Kota Yogyakarta, Komisi D dipimpin oleh tiga wakil rakyat. Masing-masing Suryani sebagai Ketua, Krisnadi Setyawan sebagai Wakil Ketua dan M Ali Fahmi sebagai Sekretaris.



Suryani SE MSI



Krisnadi Setyawan



Ali Fahmi SE MM

Sesaat setelah Pemkot Yogyakarta mendistribusikan KMS ke para penerima di wilayah, warga yang tidak lagi mendapatkan KMS pun mengadukan ke dewan. Komisi D DPRD Kota Yogyakarta selalu terbuka atas aduan masyarakat dan langsung bergerak cepat mengundang organisasi perangkat daerah terkait guna membahas persoalan tersebut. "Keluh kesah masyarakat kami terima dengan baik. Rata-rata mereka yang tidak lagi mendapatkan KMS merasa khawatir tentang kuota di sekolah negeri,"

tertinggal dengan alokasi maksimal Rp 3 juta tiap siswa bagi jenjang SD serta maksimal Rp 6 juta tiap siswa di jenjang SMA. Selain itu juga ada bantuan operasional sekolah daerah (bosda) swasta dengan besaran antara Rp 2,25 juta hingga Rp 4,5 juta persiswa pertahun sesuai jenjang sekolah. "Semua bantuan itu bisa diakses. Terutama tunggakan SPP dan ijazah tertinggal, silakan diajukan supaya nanti bisa diverifikasi. Kalau bosda swasta langsung masuk ke rekening sekolah," paparnya.

Dengan demikian, penduduk Kota Yogya seharusnya tidak khawatir menyangkut akses pendidikan. Apalagi kesehatan yang cakupannya sudah mencapai 99,9 persen. Komisi D menaruh perhatian serius untuk dua bidang tersebut guna pembangunan sumber daya manusia. Suryani juga tidak menampik sekolah negeri di Yogya sisi selatan jumlahnya sedikit. Namun pihaknya bersama dinas terkait sudah menambah jumlah kelas agar dayaampungnya semakin banyak. Langkah tersebut dinilai lebih efektif jika dibanding mendirikan sekolah baru.

Selain itu, kuota KMS untuk kursi di SMP negeri sebetulnya juga tidak banyak, yakni 11 persen. Kuota itu pun sudah mempertimbangkan rasa keadilan bagi elemen masyarakat lain yang non KMS. Lebih baik mari kita ajari anak-anak kita untuk belajar agar bisa bersaing ke jalur prestasi atau jalur mutu. Kuotanya justru lebih besar di sana. Kalau pun belum mampu bersaing, kan tidak masalah di swasta. Toh skema bantuan juga besar," tandasnya.

Pada tahun ini, semua pemegang KMS merupakan bagian dari DTKS. Jumlah DTKS Kota Yogya yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial mencapai 55.019 KK atau 146.789 jiwa. Sedangkan hasil verifikasi, terdapat 17.451 KK atau 49.121 jiwa masuk KMS tahun 2023. Selanjutnya non KMS ada 24.874 KK, tidak ditemukan 4.957 KK, menunggalkan 1.558 KK, tidak mau didata 545 KK, TNI/Polri/PNS 424 KK, pindah penduduk 4.757 KK, dan terbukti bukan warga kota 453 KK.

Selain itu, jika dibandingkan KMS 2022, pemegang KMS tahun ini justru bertambah. Pada tahun lalu tercatat ada 15.810 KK atau 48.797 jiwa sedangkan tahun ini ada 17.451 KK atau 49.121 jiwa. Terkait data pemegang KMS maupun DTKS yang dinilai warga tidak tepat, Suryani mengajak untuk melaporkan ke instansi terkait disertai bukti. Hal ini supaya intervensi dari pemerintah benar-benar tepat sasaran. (Dhi)-d



Jajaran Komisi D menggelar rapat kerja terkait KMS 2023.

KR-Ardhi Wahdan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005